

**ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT
IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS,
TRANSPARANSI, DAN KUALITAS
INFORMASI AKUNTANSI PELAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ACHMAD RAFIIUDDIN MUIZZ
NIM. 12030114183002

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

**ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT
IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS,
TRANSPARANSI, DAN KUALITAS
INFORMASI AKUNTANSI PELAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ACHMAD RAFIIUDDIN MUIZZ
NIM. 12030114183002

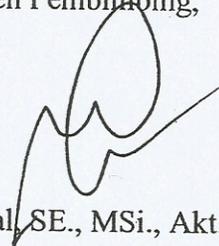
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Achmad Rafiuddin Muizz
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183002
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**
Dosen Pembimbing : Faisal, SE., MSi., Akt., Ph.D.

Semarang, 9 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Faisal, SE., MSi., Akt., Ph.D.

NIP. 19710904 2001 12 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Achmad Rafiuddin Muizz
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183002
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2016

Tim Penguji

1. Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si, Akt. (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Achmad Rafiuddin Muizz, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Juni 2016



Achmad Rafiuddin Muizz
NIM. 12030114183002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah." (Lessing)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6 - 8)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" (Nelson Mandela)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Almarhumah Mama tercinta, Nurul

Ayahanda tercinta, Abu Marfu

Kakak-kakak ku tersayang

All my beloved friends

ABSTRACT

This research aims to examine correlation between implementation level of accrual basic accounting and accountability, transparency, and accounting information quality on local government's financial reporting in Central Java Province. This research use PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual to measure implementation of accrual basic accounting, accountability, transparency, and accounting information quality.

Population of this research are auditors who work in Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah within 2014 and 2015. Purposive sampling method is used to determined research's sample. The data is obtained by examining 27 auditor's perception about accrual basic accounting implementation. It was primary data which is taken by questionnaire method. SPSS 21 for Mac was used in this research.

The result of this research indicates that there is significance correlation between implementation level of accrual basic accounting and accountability, transparency, and accounting information quality on local government's financial reporting in Central Java Province. Furthermore, Pearson's correlation coefficient that generated from the data analysis indicates that there is strong correlation among those variables.

Keywords : Accrual basic accounting implementation, accountability, transparency, accounting information quality, financial reporting, local government, Central Java Province

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk pengukuran implementasi akuntansi berbasis akrual, akuntabilitas, transparansi, serta kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor pemerintahan yang bekerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014 dan 2015. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sampel penelitian dipilih sebanyak 27 orang auditor. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner penelitian yang dikembangkan secara mandiri oleh peneliti berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21 *for Mac*.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan variabel akuntabilitas, transparansi, serta kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, nilai koefisien korelasi *Pearson* yang dihasilkan menunjukkan hubungan antar variabel-variabel tersebut tergolong dalam kategori hubungan/korelasi yang kuat.

Kata Kunci : Implementasi akuntansi berbasis akrual, akuntabilitas, transparansi, kualitas informasi akuntansi, pelaporan keuangan, pemerintah daerah, Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah” dengan lancar. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, saran, serta do'a dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fuad, S.E., M.Si., Akt., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.

4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk menandatangani berkas-berkas yang saya perlukan selama masa perkuliahan.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di lapangan, serta bantuan yang bersifat akademis maupun administratif selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Ayah dan Almarhumah Mamah tercinta, Abu Marfu dan Alm. Nurul. Both of you means everything to me. Terimakasih untuk kasih sayang dan do'a yang tiada henti kalian panjatkan untuk anak-anakmu.
7. Kakak-kakak ku tersayang, Nurma Azizah Hanum, Alawiyah Nurjannah, Arief Rahman Dzulqarnain, Nasruddin Akmal Latief, dengan segala perbedaan pandangan kita, kalian tetap kakak-kakak terbaik yang selalu jauh di mata namun dekat di hati.
8. Keponakan-keponakan ku tersayang, Ghina, Ikram, Zaki, Ammar, Hannan, Yumna, Alikha, Shayna, dan Zeva. Semoga kelak kalian sukses dan jadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa Indonesia.
9. Pakde, Bude, Om, Tante baik dari keluarga besar Djamhuri maupun keluarga besar Armilah, terimakasih atas seluruh dukungan moril, do'a, serta nasihat kalian kepada penulis.
10. CPNS Burung Garuda 15, Emir, Mean, Iman, Mike, Sinta, Tutu, Hesti. Terimakasih untuk chat-chat gokil di whatsapp dikala galau skripsi. Kapan kita kumpul, jalan, kulineran, dan karaokean lagi?

11. Rumpi family, Adi, Angky, Findo, Wiwi. I can't find people like you all. Gila, blak-blakan, konyol,superb lah!Kapan kita ketemuan lagi guys?
12. Rekan-rekan tugas belajar UNDIP 2014. Terimakasih untuk kerjasama, dukungan, dan kebersamaannya selama 2 tahun ini. Semoga kita semua sukses ke depannya.
13. Teman satu bimbingan skripsi, Rifki dan Mba Hesti. Ayo siapa yang mau sms Pak Faisal untuk bimbingan minggu depan?
14. Rekan-rekan KKN Tematik LAM-Ebis 2016. Terimakasih untuk kerjasamanya sehingga kegiatan KKN tematik berjalan lancar sesuai target.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dan pendidikan S1- Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkannya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2016

Achmad Rafiuddin Muizz

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11

2.1.1.	Teori Entitas (<i>Entity Theory</i>).....	11
2.1.2.	Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.3.	Teori <i>New Public Management</i> (NPM).....	15
2.1.4.	<i>Good Governance</i>	19
	2.1.4.1. Pengertian <i>Good Governance</i>	19
	2.1.4.2. Karakteristik dan Prinsip <i>Good Governance</i>	22
2.1.5.	Pemerintah Daerah.....	24
2.1.6.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.....	24
	2.1.6.1. Sejarah Singkat Organisasi.....	24
	2.1.6.2. Struktur Organisasi.....	27
	2.1.6.3. Uraian Tugas.....	28
2.1.7.	Akuntansi Pemerintahan dan Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.....	36
2.1.8.	Perbedaan SAP Berbasis <i>Cash Toward Accrual</i> (CTA) dan SAP Berbasis Akrua.....	40
2.2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	47
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	50
2.4.	Pengembangan Hipotesis.....	51
	2.4.1. Akuntabilitas.....	51
	2.4.2. Transparansi.....	54
	2.4.3. Kualitas Informasi Akuntansi.....	56
BAB III	METODE PENELITIAN.....	59

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	59
3.1.1. Variabel Dependen.....	59
3.1.1.1. Akuntabilitas.....	59
3.1.1.2. Transparansi.....	61
3.1.1.3. Kualitas Informasi Akuntansi.....	62
3.1.2. Variabel Independen.....	64
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	65
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	66
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	67
3.5. Metode Analisis Data.....	67
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	67
3.5.2. Uji Instrumen Data.....	68
3.5.2.1. Uji Validitas.....	68
3.5.2.2. Uji Reliabilitas.....	69
3.5.3. Uji Hipotesis.....	70
3.5.3.1. Koefisien Korelasi <i>Pearson</i>	70
3.5.3.2. Koefisien Determinasi.....	72
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	73
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	73
4.2. Analisis Data.....	75
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	75
4.2.1.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	75
4.2.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden.....	78

4.2.2. Uji Instrumen Data.....	83
4.2.2.1. Uji Validitas.....	83
4.2.2.2. Uji Reliabilitas.....	86
4.2.3. Uji Hipotesis.....	87
4.3. Interpretasi Hasil.....	90
4.3.1. Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.....	90
4.3.2. Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Transparansi Pelaporan Keuangan.....	92
4.3.3. Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Kualitas Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan.....	93
BAB V PENUTUP.....	96
5.1. Simpulan.....	96
5.2. Keterbatasan.....	98
5.3. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan SAP Berbasis <i>Cash Toward Accrual</i> (CTA) dan SAP Berbasis Akrua.....	41
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1	Indeks Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua.....	65
Tabel 3.2	Interval Kekuatan Koefisien Korelasi.....	71
Tabel 4.1	Sampel Penelitian.....	74
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	75
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Umur.....	79
Tabel 4.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Unit Kerja.....	80
Tabel 4.6	Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	81
Tabel 4.7	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	82
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas.....	84
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi.....	85
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Akuntansi.....	86
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	87
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Korelasi <i>Pearson</i>	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.....	28
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	KUESIONER PENELITIAN.....	103
LAMPIRAN 2	REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN PENELITIAN.....	112
LAMPIRAN 3	HASIL OUTPUT SPSS	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan adanya reformasi di bidang akuntansi pemerintahan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Reformasi di bidang akuntansi pemerintahan meliputi adanya perubahan kelembagaan, organisasi, serta manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang semakin meningkat. Sistem manajemen organisasi sektor publik yang semula terkesan kaku dan hierarkis bertransformasi menjadi bentuk yang lebih fleksibel dan lebih mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2002). Proses transformasi tersebut mengarah pada terciptanya suatu konsep manajemen sektor publik baru yang dikenal sebagai konsep *New Public Management* (NPM). Faktor penting yang menjadi kunci dalam reformasi di bidang akuntansi pemerintahan adalah dengan adanya pengembangan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di negara tersebut secara berkelanjutan.

Konsep NPM lahir dari berbagai kritik yang dilontarkan terhadap proses birokrasi yang kurang baik pada konsep *Old Public Administration* (OPA). Dua ilmuwan asal Amerika yang melontarkan kritik terhadap konsep OPA diantaranya adalah David Osborne dan Ted Gaebler. Mereka menyarankan suatu sistem baru yang diyakini dapat memperbaiki kelemahan pada konsep OPA, yakni konsep *New Public Management* (NPM). NPM berakar dari sebuah paradigma yang beranggapan bahwa aktivitas bisnis komersial dan manajemen pada organisasi

sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan aktivitas pelayanan dan manajemen pada organisasi sektor publik. Konsep NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan (Mardiasmo, 2002)

Perubahan dalam sistem manajemen organisasi sektor publik diikuti dengan adanya perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan. Perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual perlu dilakukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap kurang relevan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan andal. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik dianggap sebagai solusi terbaik untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem akuntansi berbasis kas. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan basis akuntansi akrual, pengguna laporan keuangan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai pada saat diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan munculnya ketiga undang-undang tersebut, tuntutan terhadap pemerintah untuk mewujudkan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan memiliki kualitas pelaporan yang baik semakin meningkat. UU No. 17 tahun 2003 mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus diterapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya undang-undang tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun pada kenyataannya, hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi akrual secara menyeluruh. Sebagai bentuk respon atas hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. PP No. 71 Tahun 2010 mensyaratkan penerapan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh maksimal dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan, yaitu pada tahun 2015. Selama periode transisi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Seiring dengan perkembangan waktu, tuntutan terhadap organisasi sektor publik untuk dapat menyelenggarakan *good governance* yang tercermin dalam pelaporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan basis akuntansi yang lebih baik, yaitu basis akuntansi akrual penuh. Di Indonesia, sejak diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), organisasi sektor publik didorong untuk beralih dari yang semula menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi basis akrual penuh. Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan serta jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee* (2002) diperoleh informasi bahwa pelaporan keuangan dengan menggunakan basis akuntansi akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christiaens (2001), Carlien dan Guthrie (2003), serta Hodges dan Mellet (2003) yang menemukan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual seringkali disertai dengan sejumlah kelemahan dan timbulnya masalah yang menghambat tingkat adopsi.

Menurut Christiaens dan Rommel (dalam Agus Hariyanto, 2012) disebutkan bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam instansi pemerintahan yang memiliki sifat usaha komersil. Menurut mereka basis akrual

tidak akan sukses diterapkan pada instansi pemerintahan yang murni menjalankan fungsi pelayanan publik. Penyusunan anggaran berbasis akrual dapat berpotensi menimbulkan masalah pada saat menerapkan kerangka akuntansi berbasis akrual yang berlaku di entitas komersil ke dalam entitas pemerintahan. Selain itu, dimensi politik yang kental dalam aktivitas instansi pemerintahan juga dinilai tidak sejalan dengan kerangka akuntansi berbasis akrual.

Dalam artikelnya, Agus Hariyanto (2012) menyebutkan bahwa Plummer, Hutchison, dan Patton (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 530 sekolah di distrik Texas. Mereka menemukan bukti bahwa informasi yang disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual tidak lebih informatif dibandingkan informasi yang disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Studi lain yang dilakukan oleh Vinnari dan Nas (2008) menunjukkan adanya potensi manajemen laba pada instansi pemerintahan ketika pelaporannya menggunakan basis akrual penuh.

Penelitian tentang akuntansi berbasis akrual masih belum banyak dilakukan, terutama yang berfokus pada kajian mengenai hubungan antara implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual tersebut. Hal ini dilakukan sejalan dengan amanat undang-undang yang mensyaratkan agar pemerintah segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Di Indonesia, berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara informal terhadap pegawai di lingkungan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa hingga saat ini untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, dari 35 Pemerintah Daerah; yang terdiri dari 6 Pemerintah Kota dan 29 Pemerintah Kabupaten; hanya Pemerintah Kota Semarang yang telah menerapkan basis akrual secara menyeluruh dalam menyajikan laporan keuangannya sejak tahun anggaran 2013. Untuk tahun anggaran 2014 hanya terdapat 4 Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual, yaitu Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Jepara, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, sedangkan untuk Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten lainnya masih belum menerapkan basis akrual dalam pelaporan keuangannya hingga tahun 2014.

Pada akhirnya, seluruh instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus menerapkan basis akrual dalam menyajikan seluruh elemen laporan keuangannya paling lambat untuk tahun anggaran 2015. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP 71 Tahun 2010, dimana batas akhir Pemerintah Daerah sudah harus menerapkan basis akrual adalah 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas

informasi akuntansi pelaporan keuangan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menguji sejauh mana hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mewujudkan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memiliki kualitas pelaporan yang baik. Namun sejauh ini masih banyak terdapat pemerintah daerah yang belum menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengingat tenggat waktu penerapan basis akrual secara menyeluruh adalah pada tahun 2015. Untuk dapat mendalami permasalahan tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual dengan kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan bukti empiris atas keberhasilan organisasi sektor publik di Indonesia dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, khususnya dampak positif yang diberikan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, temuan di lapangan terkait kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi sektor publik

selama proses implementasi akuntansi berbasis akrual dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam memperbaiki model serta meningkatkan kualitas sistem akuntansi pemerintahan untuk masa yang akan datang sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan akuntansi di lingkungan organisasi sektor publik di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Dalam bagian ini disajikan juga kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini disajikan hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil pengolahan data penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari penelitian, penjelasan mengenai keterbatasan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.